

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN**  
**PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 27 TAHUN 2021 DAN**  
**PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 25 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2022**

<b>Peraturan Wali kota Banjarbaru Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022</b>	<b>Peraturan Wali kota Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali kota Banjarbaru Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022</b>
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BANJARBARU	WALI KOTA BANJARBARU
Menimbang:	Menimbang:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022;	a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 serta guna pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Banjarbaru Tahun 2022;
	b. bahwa sehubungan dengan perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka Peraturan Wali Kota
	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022;
Mengingat:	Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);	1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);	2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);	4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);	5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 518);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 82);	6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 11);
	7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 7);
<b>MEMUTUSKAN:</b>	<b>MEMUTUSKAN:</b>
Menetapkan:	Menetapkan:
PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2022.	PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2022.
<b>BABI</b>	<b>Tetap</b>
<b>KETENTUAN UMUM</b>	<b>Tetap</b>
<b>Pasal 1</b>	<b>Tetap</b>
Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan	<b>Tetap</b>
1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.	<b>Tetap</b>
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.	<b>Tetap</b>

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.	<b>Tetap</b>
4. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah atau disingkat RKP adalah	<b>Tetap</b>
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Daerah.	<b>Tetap</b>
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.	<b>Tetap</b>
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.	<b>Tetap</b>
8. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.	<b>Tetap</b>
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Banjarbaru.	<b>Tetap</b>
10. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA atau sebutan lain adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, penelitian, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.	<b>Tetap</b>
11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu SKPD, serta pagu anggaran sementara didasarkan atas kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.	<b>Tetap</b>
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.	<b>Tetap</b>
<b>BAB II</b>	<b>Tetap</b>
<b>MAKSUD DAN TUJUAN RKPD</b>	<b>Tetap</b>
<b>Pasal 2</b>	<b>Tetap</b>
1. RKPD dimulai sejak tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.	<b>Tetap</b>

2. RKPD merupakan penjabaran RPJMD,yang memuat isu strategis pembangunan berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya, kerangka ekonomi Daerah, program prioritas pembangunan Daerah, reneana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja Daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.	<b>Tetap</b>
3.RKPD bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan Daerah antar wilayah,antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi sumber daya dalam pembangunan Daerah.	<b>Tetap</b>
4. RKPD berfungsi sebagai : a. pedoman penyusunan Renja-SKPD ; dan b. pedoman penyusunan kebijakan umum anggaran, prioritas plafon anggaran sementara, dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.	<b>Tetap</b>
<b>Pasal 3</b>	<b>Tetap</b>
Dalam rangka penyusunan Renja-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, SKPD menggunakan RKPD Tahun 2022 untuk : a. menyusun rancangan akhir Renja-SKPD Tahun 2022; dan b. sebagai bahan penyusun RKA-SKPD Tahun 2022.	<b>Tetap</b>
<b>BAB III</b>	<b>Tetap</b>
<b>RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022</b>	<b>Tetap</b>
<b>Bagian Kesatu</b>	<b>Tetap</b>
<b>Dokumen RKPD</b>	<b>Tetap</b>
<b>Pasal 4</b>	<b>Tetap</b>
1. RKPD Tahun 2022 disusun dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH BAB VI PENUTUP	RKPD Tahun 2022 disusun dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I: PENDAHULUAN BAB II: EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022 BAB III: KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH BAB IV: SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BAB V: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH BAB VI: PENUTUP
2. Penyusunan RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.	2. Uraian RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
<b>Bagian Kedua</b>	<b>Tetap</b>
<b>Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>	<b>Tetap</b>
<b>Pasal 5</b>	<b>Tetap</b>

Dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun 2022, Daerah wajib : a. menggunakan RKPD Tahun 2022 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara dengan dewan perwakilan rakyat daerah; dan b. SKPD menggunakan RKPD Tahun 2022 sebagai pembahasan RKA-SKPD dengan dewan perwakilan rakyat daerah.	<b>Tetap</b>
<b>Pasal 6</b>	<b>Tetap</b>
1. Kepala BAPPEDA menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD hasil pembahasan bersama dewan perwakilan rakyat daerah dengan RKPD Tahun 2022.	<b>Tetap</b>
2. Dalam hal RKA SKPD hasil pembahasan bersama dewan perwakilan rakyat daerah tidak sesuai dengan RKPD Tahun 2022, maka Pemerintah Daerah menggunakan hasil pembahasan dengan dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a.	<b>Tetap</b>
<b>Bagian Ketiga</b>	<b>Tetap</b>
<b>Evaluasi dan Pelaporan</b>	<b>Tetap</b>
<b>Pasal 7</b>	<b>Tetap</b>
1. Setiap SKPD menyusun laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.	<b>Tetap</b>
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui Kepala BAPPEDA paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.	<b>Tetap</b>
3. Laporan kinerja triwulan dan tahunan menjadi bahan Kepala Bappeda untuk melakukan analisis dan evaluasi terhadap usulan rencana kerja dan anggaran yang diajukan oleh SKPD pada tahun anggaran berikutnya.	<b>Tetap</b>
<b>BAB IV</b>	<b>Tetap</b>
<b>KETENTUAN PERALIHAN</b>	<b>Tetap</b>
<b>Pasal 8</b>	<b>Tetap</b>
1. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan RKPD Tahun 2021 akibat adanya kebijakan pemerintah dan force majeure, dapat dilakukan penambahan dan Zatau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif apabila belum tertampung dalam Peraturan Wali Kota ini.	<b>Tetap</b>
2. Penambahan dan/atau pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan ketika proses pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan dengan melakukan perubahan Peraturan Wali Kota ini.	<b>Tetap</b>
<b>BAB V</b>	<b>Tetap</b>
<b>PENUTUP</b>	<b>Tetap</b>
<b>Pasal 9</b>	<b>Tetap</b>
Dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini harus sesuai dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<b>Tetap</b>
<b>Pasal 10</b>	<b>Pasal II</b>
Peraturan WaliKota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.
Ditetapkan di Banjarbaru	Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 6 Juli 2021	pada tanggal 29 Juli 2022
WALIKOTA BANJARBARU,	WALI KOTA BANJARBARU,
TTD	TTD
M. ADITYA MUFTI ARIFFIN	M. ADITYA MUFTI ARIFFIN
Diundangkan di Banjarbaru	Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 6 Juli 2021	pada tanggal 29 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH	Plh. SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANJARBARU,	KOTA BANJARBARU,
TTD	TTD
SAID ABDULLAH	SAID ABDULLAH
BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2021 NOMOR 27	BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2022 NOMOR 25